

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah tertuang di dalam pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penelitiannya dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi sebagai berikut:

1. Tingkat kontribusi pajak restoran di Kota Sukabumi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dikatakan stabil meskipun ditahun 2016 mengalami sedikit penurunan akan tetapi ditahun selanjutnya berhasil mengalami kenaikan dan ditahun-tahun berikutnya pun mengalami kenaikan.
2. Pemerintah Kota Sukabumi khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi mempunyai strategi dan juga inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya pajak restoran. Strategi dan inovasi tersebut adalah:
 - a. Sosialisai tentang pajak yang dilakukan secara rutin kepada wajib pajak, calon wajib pajak, dan semua lapisan masyarakat agar masyarakat tahu pentingnya untuk membayar pajak.
 - b. Adanya aplikasi PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi) yang tujuannya untuk mempermudah warga sukabumi dalam melaporkan dan

membayar kewajiban pajaknya karena tidak perlu lagi membayar pajak di loket resmi Bapenda cukup melalui aplikasi PANTAS.

- c. Adanya aplikasi e-BPHTB yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam membayar BPHTB atas transaksi jual beli tanah dan atau bangunan.
 - d. Adanya pemasangan alat perekam transaksi yaitu *Tapping Box* yang dipasang di hotel dan restoran. Tujuannya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak.
3. Kendala utama pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya pajak restoran adalah masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat faktor yang lainnya adalah sebagai berikut:
- a. Pendaftaran wajib pajak yang harus dilakukan di loket resmi BPKD. Karena harus mendaftar di loket resmi BPKD tentu disaat ada pendaftar yang membludak, wajib pajak harus mengantri bahkan sampai berjam-jam. Hal ini tentu akan membuat wajib pajak merasa tidak nyaman dan bahkan merasa enggan untuk membayar pajak karena untuk mendaftar saja harus menunggu berjam-jam.
 - b. Pelaporan dan pembayaran wajib pajak yang juga hanya bisa dilakukan di loket resmi BPKD. Tentu hal ini juga jika pada saat pelaporan dan pembayaran ada banyak wajib pajak yang akan melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tentu memakan waktu berjam-jam juga, karena

hal ini akhirnya bisa mengakibatkan adanya SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang telat dilaporkan.

- c. Penagihan pajak belum adanya juru sita untuk wajib pajak yang menunggak pajak. sehingga untuk sanksi wajib pajak yang menunggak pajak hanya diberi sanksi sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi harus menambah sumber daya manusia di bidang penagihan pajak supaya dapat meningkatkan pengawasan dan kinerja dilapangan. Selain itu, untuk pajak restoran sendiri agar semua wajib pajak restoran bisa dipasang alat *Tapping Box* agar pengawasan dan pengendalian pajak restoran bisa dilakukan secara maksimal. Selain itu, pemerintah harus bersikap tegas terhadap wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak, jangan hanya diberi sanksi sosial saja akan tetapi diberi sanksi khusus misal membuat suatu pernyataan publik untuk mengakui bahwa dirinya belum membayar pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberi efek jera serta *shock therapy* agar mereka tidak mengulangi kesalahannya lagi.
2. Bagi pihak restoran, melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu. Karena dengan mereka membayar pajak secara tepat waktu, mereka ikut serta dalam membantu pembangunan daerah.

3. Wajib pajak harus mempunyai kesadaran tentang pentingnya membayar pajak dan harus menghilangkan anggapan bahwa uang pajak yang dibayarkan nantinya akan di konsumsi oleh pemerintah.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar mendalami lagi penelitian terkait dengan pajak restoran dengan menambah variabel-variabel baru khususnya yang terkait dengan proses penetapan PAD, tentang kendala yang dialami pemerintah dalam memaksimalkan potensi pajak daerah khususnya pajak restoran dan pengalokasian pajak daerah terhadap pembangunan daerah.